

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

(Ledy, Sondakh, & Warongan, 2017) melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Taulud. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Taulud. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan pengumpulan data yang diperoleh dari kuisioner. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Taulud.

(Ruhmaini, Abdullah, & Darwanis, 2018) melakukan penelitian mengenai Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui serapan anggaran belanja pemerintah kabupaten aceh tengah yang meliputi jenisbelanja, fungsi dan organisasi. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui serapan anggaran belanja berdasarkan jenis belanja. Fungsi dan organisasiberfluktuatif setiap

tahunnya. Dengan rata-rata serapan anggaran dari tahun 2012 hingga tahun 2015 berdasarkan jenis belanja sebesar 87,03%, sedangkan untuk rata-rata serapan belanja berdasarkan fungsi sebesar 93,32%, dan untuk rata-rata serapan belanja berdasarkan organisasi sebesar 94,44%.

(Anfujatin, 2016) melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Faktor-Faktor Penyebab Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Tuban pada triwulan III pada tahun 2015. metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data yang di analisis terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini ialah faktor sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya penyerpan anggaran pada triwulan III pada tahun 2015 sebesar 62,5%, pengadaan barang jasa sebesar 61,8% dan kurangnya perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan sebesar 61,4%.

(Widianingrum, Kustono, & Suryaningsih, 2017) melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dengan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hasil dari penelitian ini ialah menyatakan bahwa terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran belanja daerah di pemerintah kabupaten situbondo yang terdiri dari

faktor perencanaan sebesar 24,31%, faktor pengadaan sebesar 11.10%, faktor regulasi sebesar 8,57%, faktor internal sebesar 7,03%, faktor administrasi sebesar 5,92% dan faktor sumber daya manusia sebesar 5,56%. Keenam faktor tersebut memiliki variasi sebesar 62,49% dalam mempengaruhi penyerapan anggaran, dan sisanya sebesar 37,51% dijelaskan oleh faktor lain.

(Kusuma Negara, Handajani, & Effendy, 2018) melakukan penelitian mengenai Studi Kasus Tingkat Serapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran daerah unit pemerintah terutama pada awal tahun Biro Umum Setda Provinsi NTB. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan tingkat penyerapan anggaran pada biro umum setda provinsi ntb setelah diidentifikasi menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Faktor-faktor yang dominan adalah kebijakan, administrasi dan sumber daya manusia. Ketiga faktor ini memiliki dampak kuat pada tingkat penyerapan anggaran yang cenderung rendah pada awal tahun dan sebagai akibat terjadinya akumulasi anggaran.

Adapun keterkaitan penelitian ini dengan terdahulu adalah penelitian ini memiliki kesamaan variabel yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah tetapi penelitian ini dilakukan di Kota Batu.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pemerintah ialah dokumen formal yang berasal dari kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai belanja yang telah ditetapkan guna memenuhi kegiatan pemerintah dan mendapatkan pendapatan yang diharapkan dapat menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang dibutuhkan bila sewaktu-waktu terjadi defisit atau surplus (Darise, 2007).

Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. Terdapat enam fungsi APBD yang telah diterapkan dalam setiap penyusunan APBD yaitu :

a. Fungsi Otorisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Otorisasi sendiri mempunyai makna “pemberian kekuasaan”, hal ini jika dikaitkan dengan APBD, seseorang atau satuan kerja diberi kekuasaan untuk melaksanakan setiap anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Bagi SKPD yang mengaggarkan pendapatan dan telah ditampung dalam APBD, sudah seharusnya mengupayakan seoptimal mungkin untuk merealisasikan pendapatan yang menjadi tanggung jawab SKPD tersebut

b. Fungsi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melaksanakan suatu kegiatan apabila sejak awal telah direncanakan maka diharapkan akan meminimalkan hambatan dan bisa ditengah perjalanan pelaksanaannya.

Ketika APBD telah ditetapkan, menjadi kewajiban setiap penggunaan anggaran untuk membuat anggaran kas agar kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

c. Fungsi Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dokumen perda tentang APBD memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD tersebut merupakan implementasi dan pelaksanaan atas urusan pemerintahan yang telah diserahkan dari pusat kepada daerah baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan.

d. Fungsi Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Seyogyanya, ketika menyusun program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBD supaya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pada akhirnya secara signifikan akan mengurangi pengangguran di daerah yang bersangkutan.

e. Fungsi Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam kaitan ini, sering terdengar istilah yang dilontarkan para pakar maupun orang awam bahwa APBD adalah 'uang rakyat'. Jika APBD adalah benar 'uang rakyat', sudah seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan.

f. Fungsi Stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dengan fungsi stabilisasi ini, APBD sejatinya dapat digunakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi pada tingkat lokal. Pengimplementasian fungsi stabilisasi dapat melalui kebijakan pengalokasian belanja subsidi dalam APBD.

Alokasi anggaran belanja subsidi diberikan kepada lembaga/perusahaan yang memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Subsidi ini pada dasarnya diberikan untuk bantuan biaya produksi pada lembaga/perusahaan

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen, teknik, atau metode. Oleh karena itu, belanja daerah akan menyesuaikan arah dan kebijakan anggaran, tepatnya kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah. dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi, maka belanja daerah mampu melaksanakan tiga tujuan dari kebijakan ekonomi seperti pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Dalam menjaga stabilitas ekonomi belanja daerah harus ditargetkan pada pelaksanaan disiplin anggaran, sedangkan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan belanja daerah perlu difokuskan pada efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran pada berbagai program pembangunan. Tujuan pokok belanja daerah (Mahmudi, 2010):

- a. Menjamin dilaksanakannya disiplin fiskal melalui pendengdalian belanja
- b. Alokasi anggaran yang sesuai dengan kebijakan dan prioritas anggaran
- c. Menjamin adanya efisiensi dan efejtivitas alokasi anggaran.

Terdapat beberapa prinsip belaja daerah yang eprlu diperhatikan sebagai berikut :

a. Perencanaan belanja daerah

Belanja daerah yang ada didalam APBD harus terencana dengan baik. Anggaran yang direncanakan dengan baik akan mempermudah tahap implementasi dan memungkinkan dicapainya sasaran secara efektif. Namun sebaliknya jika anggaran yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan baik meskipun telah diimplementasikan dengan baik tidak akan mendapatkan hasil yang efektif(Mahmudi, 2010).

b. Pengendalian belanja daerah

Anggaran harus menjamin dilakukannya pengenalan belanja secara memadai. Maka dalam siklus pengeluaran harus dapat dikendalikan dan di pantau dengan baik. Dalam proses pengeluaran harus dapat di cek mulai dari proses kelengkapan dokumen anggaran, otorisasi dari pejabat yang berwenang, dan adanya bukti yang kuat dan valid. Dalam proses pelaksanaannya di harapkan dapat dilakukan tepat pada waktunya. Anggaran belanja harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, Terlalu cepat dan terlalu lambatnya target penyerapan anggran menunjukkan bahwa kurang bagusnya pelaksanaan anggaran (Mahmudi, 2010).

c. Akuntabilitas belanja daerah

Belanja daerah harus dapat melaksanakan prinsip akuntabilitas publik, yaitu setiap adanya belanja daerah mampu dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada public baik secara

langsung maupun melalui DPRD. Adapun akuntabilitas belanja daerah harus meliputi (Mahmudi, 2010) :

- Akuntabilitas hukum
- Akuntabilitas finansial
- Akuntabilitas program
- Akuntabilitas manajerial

d. Auditabilitas belanja daerah

Auditabilitas belanja daerah mengandung arti bahwa setiap pengeluaran belanja yang dapat mempengaruhi beban APBD yang dapat diverifikasi atau diaudit. Verifikasi atau audit belanja daerah tersebut meliputi (Mahmudi, 2010):

- Kelengkapan dokumen anggaran, seperti DPA-SKPD, SPD, SPP, SPM, SPJ dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan
- Adanya dokumen transaksi yang valid
- Dilaksanakannya pencatatan yang memadai
- Dapat diuji silang antara catatan dengan keberadaan.

3. Anggaran

Anggaran ialah sarana utama dalam perencanaan, pendengdalian dan pengambilan suatu keputusan dalam pengambilan keputusan. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk finansial (Mardiasmo, 2006). Aspek-aspek yang harus ada didalam anggaran meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas publik.

Anggaran, perencanaan dan pengendalian memiliki hubungan yang kuat dimana perencanaan dilaksanakan untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pengendalian lebih fokus kebelakang untuk membandingkan sejauh mana perencanaan yang telah terjadi. Anggaran berfungsi sebagai berikut (Bastian, 2002):

- Anggaran ialah hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja
- Anggaran ialah cetak biru aktivitas yang akan dilakukan di masa mendatang
- Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja anatatan serta bawahan
- Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
- Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian misi organisasi.

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dapat dinyatakan dengan ukuran keuangan. Penganggaran merupakan tahapan yang cukup penting dan mengandung politik (Mardiasmo, 2010). Penganggaran ialah proses yang menentukan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas kegiatan. Dalam proses kegiatan penganggaran harus diawasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Peran penganggaran di dalam perencanaan, pengendalian, dan dalam pembuatan keputusan, serta dalam meningkatkan kegiatan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terkait/terlibat dalam pelaksanaan (Mardiasmo, 2006). Penganggaran merupakan bagian terpenting dari

pengelolaan keuangan pemerintahan dan dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, seperti politik, ekonomi, keuangan, dan akuntansi (Abdullah, Syukriy Nazry, 2015).

4. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran ialah proses tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Dimulainya penyerapan anggaran ditandai dengan Undang-Undang (UU) Anggaran Penapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan oleh DPR. Belanja barang dan belanja jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Diharapkan setiap instansi pemerintah mampu mengelola pengeluaran belanja daerah agar berjalan lancar dan mampu mendorong keberhasilan dalam pencapaian target pembangunan nasional. Penyerapan anggaran yang diharapkan mampu memenuhi sasaran sebesar 100% namun tidak menutup kemungkinan penyerapan anggaran yang terjadi setidaknya lebih dari 80% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Tingkat penyerapan anggaran yang rendah dapat mempengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan. antara lain efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan Negara menjadi tidak tepat sasaran, berdasarkan indikator keberhasilan anggaran yang telah ditetapkan.

Kegagalan dalam target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya digunakan.

5. Faktor – Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran

a. Faktor Perencanaan

Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya (Bastian, 2002). Perencanaan (planning) ialah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu penentuan rencana untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengatur seluruh pekerjaan yang berorganisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002). Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan (Ernie dan Kurniawan, 2005).

1. Dari sisi proses, fungsi perencanaan ialah dasar proses yang dilakukan dalam memulai tujuan dan menentukan tujuan yang akan dicapai.
2. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan ialah fungsi dimana pengaruh dan wewenang pimpinan memiliki pengaruh yang dapat memutuskan dan mengubah tujuan kegiatan organisasi.
3. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan ialah pengembalian keputusan jangka panjang yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa

yang akan melakukannya. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya hingga penerapan perencanaan tersebut dapat menghasilkan di kemudian hari.

Penyerapan anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran yang maksimal tanpa adanya perencanaan anggaran yang baik maka akan sulit terwujud. Perencanaan anggaran merupakan kegiatan analisis dan pengambilan keputusan untuk kedepannya dalam menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang. Perencanaan ialah upaya dalam menentukan tujuan dan target suatu organisasi dalam melakukan kegiatan (Halim & Kusufi, 2014). Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis taktis dan melibatkan aspek operasional. Peran perencanaan organisasi akuntansi manajemen dalam pemberian informasi historis maupun prospektif untuk mempermudah perencanaan. Proses perencanaan juga menyertakan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya.

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di Pemda, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai

kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran (Abdullah, 2006).

Dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota menurut (Darise, 2007) meliputi : 1)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 3)Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan untuk dokumen perencanaan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi : 1)Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan 2)Rencana Kerja SKPD. Dari dokumen-dokumen di atas memiliki keterkaitan antara dokumen satu dengan dokumen yang lain.

b. Faktor Administrasi

Administrasi merupakan kegiatan yang meliputi catat-mencatat, kegiatan surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan kegiatan yang sifatnya teknis ketatusahaan (Handyaningrat, 1988). Dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti sempit ialah kegiatan yang berhubungan dengan ketatusahaan baik itu kegiatan catat-mecatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang didalamnya memberikan informasi guna mempermudah mendapatkan informasi jika dibutuhkan.

Dalam arti luas administrasi merupakan hubungan kegiatan yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rangka melakukan kerjasama untuk memperoleh tujuan tertentu. Selain itu, administrasi dapat disimpulkan bahwa semua mengandung faktor pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi pada intinya mencakup seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan suatu atau banyak orang terlibat di dalamnya.

Administrasi ialah keseluruhan rangkaian dari proses kerjasama antara beberapa orang yang didasarkan atas asas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2014). Selain administrasi internal suatu instansi terdapat juga administrasi yang dipengaruhi oleh pihak eksternal yang dapat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran satuan kerja (Priatno & Khusaini, 2016).

c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Suharto (2012) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia sebagai kemampuan dari pegawai dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan profesionalisme dalam bekerja. (Hutapea dan Thoha, 2008) ada tiga komponen kompetensi yaitu :

1. Pengetahuan (knowledge), informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya.
2. Kemampuan (skill), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.
3. Perilaku individu (attitude), perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.

(Halim & Kusufi, 2014), kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

Terdapat tiga pengertian sumber daya manusia sebagai berikut (Nawawi, 2001):

1. Sumber daya manusia ialah seseorang yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
2. Sumber daya manusia merupakan potensi manusiawi sebagai pendorong kegiatan dalam menjadikan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia ialah potensi yang merupakan aset dan memiliki fungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat menjadikan potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

d. Faktor Pengadaan

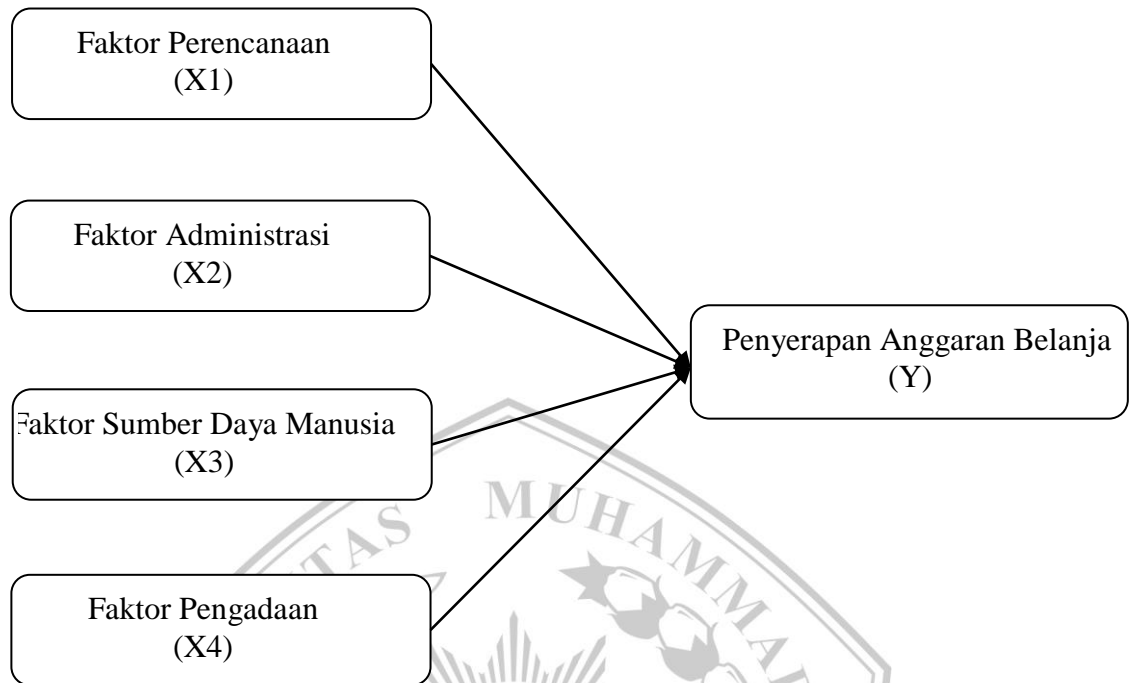
Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada

mekanisme pembayaran(pencairan anggaran). Realisasi atas pembayaran kegiatan merupakan serapan anggaran(Herriyanto, 2012).

Pengadaan barang dan jasa merupakan penambahan barang dan jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal, dalam kuantitas dan kualitas yang benar, pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan dari sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung(Bastian, 2010).

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, pemerintah mengatur tata cara pengadaan barang jasa dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan pengadaan barang jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang jasa.

C. Perumusan Hipotesis



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kota Batu
- Administrasi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kota Batu
- Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kota Batu
- Pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kota Batu.

